

BAB II
PELAKSANAAN PKL



2.1. Kegiatan Sehari-hari

Pada bab ini akan dijelaskan tentang aktivitas kerja yang dilaksanakan selama PKL secara rinci mulai dari hari pertama PKL hingga hari terakhir. Kegiatan yang dikerjakan setiap harinya sama, hanya mencari berita dikawasan komplek Gedung Sate atau kantor gubernur dan DPRD Jawa Barat. Baik berupa press release atau demo yang terjadi di komplek gedung sate tersebut.

Mencari berita tersebut dilaksanakan mulai pukul 10.00 s.d. 17.00 kemudian setelah itu, pulang ke Redaksi untuk membuat berita yang penulis liput di gedung sate dengan deadline jam 21.00 berita harus sudah ada pada redaktur, yang kemudian di edit untuk naik cetak apabila berita tersebut memang layak untuk ditampilkan. Adapun berita-berita yang penulis dapat dari hari pertama sampai terakhir PKL adalah sebagai berikut:

Selasa, 5 Agustus 2003,

Test membuat berita oleh Redaksi selama 1jam. setelah itu diperiksa oleh redaktur. Selanjutnya pembagian untuk mencari berita dan penulis mendapat tempat mencari berita di Gedung Sate atau Gedung DPRD Jabar atau Kantor Gubernur, beserta dengan pembimbing wartawan yang akan mengawasi kerja penulis selama berada dilapangan atau sedang meliput berita.

Rabu, 6 Agustus 2003.

Meliput tentang demo masyarakat yang tergabung dalam Serikat Petani Jawa Barat (SPIB) dan Yayasan Tanah Air (YATINI), yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jabar melalui wawancara dengan koordinator masing-masing yaitu AR Wahab dan Mia Astuti serta meminta releasenya, yang intinya menolak pembangunan waduk jatigede. Beritanya:

“Hentikan Pembangunan Dam Jatigede”

Masyarakat dari 13 desa yang tergabung dalam Serikat Petani Jawa Barat (PSJB) Dan Yayasan Tanah Air (YATINI), berunjuk rasa didepan gedung DPRD Jawa Barat, rabu (6/8). Mereka menolak pembangunan Dam Jatigede.

Dam Jatigede yang akan menggenangi 13 desa, bakal menggenangi sebagian areal 9 desa, dan menggunakan 4 desa sebagai areal sabuk hijau, yang seluruhnya menggunakan areal 30 desa di 5 kecamatan seluas 6.738 ha. Termasuk daerah perhutani seluas 1.200 ha. Daerah rencana pembangunan proyek ini merupakan daerah yang subur yang ditempati sekitar 8.114 kepala keluarga. Dengan adanya proyek ini, seluruh penduduk akan tergusur.

Proses pengganti rugian sudah dilakukan dalam 3 periode. Pertama 1982/1984, Kedua 1992/1994, dan terakhir 1996. Dari ketiga proses tersebut masyarakat tidak pernah dilibatkan selain menerima penggantian. Pada periode pertama, 6 orang warga yang menolak menjual lahannya ditahan KODIM Sumedang. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan seorang korban yang masih hidup (pak Somawijaya, Cibungur) mengalami cacat pendengaran.

Selain itu, ketidakpastian terus berulang. Hampir setiap menjelang Pemilu, rencana pembangunan Dam digembar-gemborkan. Namun pada kenyataanya, dilapangan tidak ada yang terjadi selain kebingungan rakyat yang terpaksa harus pindah.

Kamis, 7 Agustus 2003.

Mendapat release dari dari Kantor Humas Gubernur Jabar yang isinya tentang acara pertemuan konsultasi forum tripartite Jabar dalam penanggulangan HIV/AIDS didunia kerja, beritanya :

“HIV/AIDS Banyak terjangkit pada usia kerja”

Gubernur mengatakan, bahwa peningkatan epidemi HIV/AIDS di Indonesia termasuk Jabar, menunjukkan kecenderungan penyebaran yang cukup luas, sehingga dapat mengancam kelangsungan pembangunan bangsa. Berbagai respon dan langkah dan langkah antisipasi dari masyarakat, dan pemerintah daerah telah menggalang, antara lain dengan membentuk komisi penanggulangan AIDS daerah (KPAD).

Berdasarkan laporan pemerintah, Jabar merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang sudah terancampenularan HIV/AIDS, yang sejak tahun 1989 sampai dengan Mei 2002 telah ditemukan 548 orang di Jabar terinfeksi HIV/AIDS, yakni 37 orang terkena AIDS dan 501 orang terkena HIV,” Kata Gubernur.

Bagi dunia kerja peningkatan epidemik HIV/AIDS telah menunjukkan dampak yang cukup serius, karena sebagian orang yang terinfeksi tersebut adalah pekerja usia produktif. Karena itu, kerugian yang ditimbulkan dari penurunan kualitas dan produktifitas angkatan kerja akibat epidemik HIV/AIDS, ini akan sangat besar.

Jumat, 8 Agustus 2003.

Meliput tentang demontrasi sopir angkot, yang trayeknya diambil oleh Damri jurusan kebun Kelapa via rancaekek, yang informasinya didapat dari koordinator demo sopir angkot tersebut, dan beritanya :

“Ratusan Sopir Angkot Datangi DPRD Jabar”

Kehadiran Damri Jurusan Kelapa via rancaekek membuat sopir angkot kekurangan penumpang yang akibatnya pendapatannya pun berkurang pula. Hal tersebut menyebabkan ratusan sopir angkot melakukan demonstrasi didepan Gedung DPRD Jabar dan menuntut agar trayek yang dilalui oleh Damri tersebut di kaji ulang oleh Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Bandung

Selain itu, jalur yang dilalui Damri tidak layak, karena lebar jalannya tidak memenuhi standart sehingga banyak menyebabkan kemacetan lalu lintas, perwakilan sopir angkot tersebut, ingin dipertemukan dengan pihak terkait agar masalah tersebut dapat dengan cepat terselesaikan dan meminta anggota dewan memperhatikan kepentingan masyarakat kecil.



Minggu, 10 Agustus 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur tentang rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Propinsi Jabar Tahun Anggaran 2003, bertempat di Gedung KORPRI Propinsi Jabar oleh Gubernur, beritanya :

“APBD Tingkatkan Kualitas Pelayanan”

Evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD propinsi Jabar tahun 2003, sebagai langkah pengendalian bagi tercapainya sasaran kegiatan bersama yang diharapkan mendapat hasil yang optimal, menurut gubernur dalam rapat evaluas pelaksanaan kegiatan APBD Jabar, di gedung KORPRI, Jl. Turangga No. 25 Bandung.

Gubernur mengatakan, momen ini sangat penting sebagai strategi dalam forum pengendalian, sekaligus sebagai media komunikasi terutama bagi kegiatan-kegiatan yang mengalami hambatan. Salah satu hambatan dibidang pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan isu desentralisasi fiscal, yang sering dibahas hanya sisi pendapatan, padahal sisi pengeluaran juga tidak kalah pentingnya yang langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Pelayanan yang berkualitas dapat dicapai, apabila pemanfaatan dana-dana oleh pemerintah daerah sebagian besar digunakan untuk pelayanan public, dibandingkan untuk biaya-biaya pengeluaran rutin. Selama ini metode penganggaran di Indonesia berdasarkan pada line item budgeting, sumber daya dikuasai oleh pemerintah dialokasikan menurut kategori input dan unit organisasi.

Senin, 11 Agustus 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur yang beritanya berisi tentang Pelepasan mahasiswa dan santri dalam Kegiatan Kerja Nyata Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren di Jawa Barat. Beritanya :

“PONPES tingkatkan SDM”

Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya membentuk kapabilitas manusia sehingga dapat mengakses berbagai kesempatan sebagai pribadi yang mandiri, yang ajang muncul apabila situasi dan kondisi mendukung secara kondusif, dalam upaya menguatkan posisi tawar masyarakat desa yang sebagian besar bermata pencaharian pertanian dan usaha kecil menengah. Belum sepakatnya kalangan perbankan yang dituntut untuk menurunkan Non Performing Loan dengan Kapabilitas masyarakat desa. Senin (11/8). Dalam sambutan gubernur yang dibacakan PLH Sekda Jabar, Drs. H Abdul Wachyan, Msi. Dalam acara pelepasan mahasiswa

dan santri dalam kegiatan kerja nyata terpadu perguruan tinggi dan pondok pesantren di Jabar.

Dengan program yang mensinergiskan potensi mahasiswa dan santri untuk membangun masyarakat desa yang lebih sejahtera, mudah-mudahan baik secara langsung atau tidak dapat meningkatkan indicator IPM Desa yang gilirannya akan meningkatkan IPM Kabupaten/ kota dan Propinsi sebagaimana dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama, harap sekda.

Sekda juga mengatakan, bahwa dalam era globalisasi yang penuh dengan kompetisi dan ketidak pastian, semua pihak hedaknya bergandeng tangan untuk berkolaborasi dan kemitraan secara sinergis dan sistematis. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki mengharuskan memilih prioritas kegiatan yang mempunyai multiplier effect, diantaranya melalui kegiatan pengalokasian anggaran publik yang semakin meningkat, serta melalui pendekatan untuk menumbuhkan intensitas kepedulian pihak yang mempunyai sumber daya yang melimpah seperti perbankan, individu, Swasta, Lembaga, dan kelompok yang menguasai modal besar.

Selasa, 12 Agustus 2003.

Meliput tentang demonstrasi yang dilakukan oleh karyawan PT DI yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, yang informasinya diperoleh langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dan meminta releasenya kepada koordinatornya, berita ini dimuat di Harian Umum *Pikiran Rakyat*.

“Karyawan PT DI serbu DPRD”

Ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SP FKK) “menyerbu” DPRD Jabar di Jln. Diponegoro kamis (12/8). Mereka kembali menyampaikan penolakannya terhadap SK Dirut PT DI No.SKEP/0598/030.02/PT/UT0000/07/03 Tentang Program Pengrumahan Karyawan PT DI. Terlebih Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Jacob Nuwawea meminta agar SK tersebut segera di cabut.

Selain itu, SP FKK menilai pelaksanaan SK Dirut tersebut tidak konsisten. Dalam poin 3 disebutkan lamanya program pengrumahan diterapkan selama 6 bulan sejak tanggal ditetapkan. Artinya, karyawan akan dipanggil untuk bekerja setelah 6 bulan. Bila ada karyawan yang dipanggil untuk bekerja sebelum 6 bulan, berarti pemanggilan tersebut melanggar keputusan pengrumahan itu sendiri.

Untuk itu, SP FKK meminta pada seluruh anggotanya agar tidak mengindahkan dan/atau menolak panggilan Direktur Utama (Dirut) PT DI untuk kembali masuk kerja sampai pihak Dirut mencabut keputusan pengrumahan

karyawan. Bagi mereka yang tidak mengikutinya, pengurus SP FKK akan menjatuhkan sanksi, bahkan dipecat dari keanggotaan SP FKK.

SP FKK juga meminta kepada seluruh anggotanya agar tetap bersama-sama memperjuangkan hak-hak karyawan berdasarkan kebenaran dan keadilan dibawah koordinasi SP FKK serta menjaga solidaritas, persatuan dan kesatuan. SP FKK menilai SK Dirut melanggar UU. No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Kepmen No. 117/M-MBU/2002 tentang Pemerintahan Good Corporate Governance pada BUMN.

Unjuk rasa yang berlangsung dihalaman luar DPRD Jabar kemarin berlangsung aman dan tertib. Mereka meminta agar DPRD dan Gubernur Jabar memperhatikan nasib para karyawan PT DI. Salah satunya, dengan melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat agar permasalahan PT DI cepat diselesaikan dan tidak berlarut-larut.

Jika suara mereka tidak didengarkan oleh DPRD dan Gubernur Jabar, mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi. Terlebih mereka menganggap bahwa persoalan yang terjadi di PT DI sudah bermuasa politik sehingga sulit untuk segera diselesaikan. Hal itu terlihat dari adanya perlakuan diskriminatif antara karyawan yang masih bekerja dan yang dirumahkan. Karyawan yang dirumahkan tidak dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang pernah diberikan oleh PT DI sebelum mereka dirumahkan.

Setelah menyampaikan aspirasinya, ribuan karyawan yang mengendarai sepeda motor dan mobil, kembali ke PT DI dengan cara berkonvoi. Akibatnya, arus lalu lintas yang dilewati iring-iringan kendaraan tersebut menjadi macet. Seperti di Jln. Supratman, Jln. A. Yani, Jln. Asia-Afrika, dan Jln. Sudirman. Bahkan, petugas Kepolisian sempat menutup iring-iringan tersebut didepan Alun-alun Bandung. Namun, beberapa saat kemudian, petugas mengizinkan ribuan karyawan melanjutkan konvoi untuk menuju PT DI.

Rabu, 13 Agustus 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur Jabar yang berisi tentang Penyerahan Arsip Mantan Gubernur dan Mantan Pejabat Pemprov ke Badan Kearsipan Daerah (Basipda) Jabar, yang dibuka oleh Gubernur, bertempat di Jl. Kawaluyaan Bandung, beritanya :

“Arsip diserahkan ke Basipda”

Sejumlah mantan gubernur dan keluarga mantan gubernur Jabar periode 1956-1993 menyerahkan arsip yang dimilikinya untuk disimpan Badan Kearsipan Daerah (Basipda) Jabar. Penyerahan arsip para mantan pejabat pemprov Jabar tersebut dilakukan dalam suatu upacara dikantor Basipda Jabar Jln. Kewaluyaan Bandung, rabu (13/8).

Tampak hadir pada acara penyerahan arsip yang disaksikan Wagub Jabar Nu'man Abdul Hakim dan Kepala Arsip Nasional RI Oman Sachroni tersebut, mantan Gubernur Jabar Letjen TNI (Purn) Dr. (H.C.) H. Mashudi dan Ny. Hj Aang Kunaefi. Juga mantan Wagub Jabar H. Aboeng Kusman, H. Karna Suwanda, dan H. Dedem Ruchlia.

Kepala arsip nasional RI Oman Syahroni menilai penyerahan arsip merupakan wujud nyata dari kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pentingnya arsip dan bukti nyata pengabdian kepada bangsa dan negara. Arsip yang diserahkan akan menjadi salah satu bukti akuntabilitas kepada masyarakat Jabar, khususnya bagi generasi sekarang dan akan datang.

Kamis, 14 Agustus 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur, yang berisi tentang Panen Padi Pemupukan Berimbang di Paliman, Cirebon. Beritanya :

“Teknologi Pertanian Tingkatkan Hasil”

Sejak dicanangkannya pembangunan nasional, pembangunan sektor pertanian telah mendapat prioritas untuk dikembangkan, karena pemerintah menyadari sebagai negara agraris, pertanian merupakan modal dasar yang kuat bagi suksesnya pembangunan diberbagai bidang lainnya, dinyatakan Gubernur Jabar Danny Setiawan, pada acara panan padi dan pemupukan berimbang di Desa Pegagan, kecamatan Paliman Cirebon, kamis (14/8).

bahwa kemajuan pembangunan pertanian di Indonesia belum optimal. Bahkan memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas dewasa ini, produk-produk pertanian nampaknya belum cukup mampu bersaing dengan dunia Internasional, bahkan dipasaran domestik, Ujar gubernur

Langkah inovatif telah dilakukan oleh kelompok tani Sriwijaya didesa pegagan, dengan melaksanakan teknologi pemupukan berimbang, dengan penggunaan urea, TSP, KCL, ditambah dengan pupuk pelengkap cair, dan pengguna pestisida secara tepat jenis dan tepat jumlahnya, dinilai gubernur merupakan langkah strategis, yang dapat dilakukan para petani, didalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian



Jumat, 15 Agustus 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur yang berisi tentang acara penerimaan peserta saresehan keteladanan Propinsi Jabar tahun 2003, yang beritanya :

“Penghargaan Sebagai Motivasi Bagi Masyarakat”

Penyelenggaraan saresehan keteladanan propinsi Jabar tahun 2003, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan dan motivasi, bagi anggota masyarakat Jabar yang berprestasi, mendedikasikan dirinya untuk kepentingan umum, maupun diri dan kelompoknya dari berbagai komponen dan sektor kehidupan, dikatakan assisten kesejahteraan sosial propinsi Jabar, dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh kepala biro pelayanan sosial dasar Drs. H.M. Suyaman, di wisma Taruna, JL. Lengkong Besar 64 Bandung, jumat (15/8). Pada acara penerimaan peserta sarasehan keteladanan propinsi Jabar tahun 2003.

Penghargaan yang diberikan pemerintah jangan dipandang dan diukur dengan materi semata, namun lebih penting pengakuan baik dari pemerintah, maupun masyarakat luas terhadap pengabdian dan prestasi yang telah diwujudkan para teladan sebagai salah satu kerja keras, dedikasi, loyalitas, ketekunan, dan kedisiplinan yang tinggi, yang pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” Harap Assisten.

Lanjut assisten, bahwa menghadapi kondisi sekarang ini, yang sedang transisi, setelah mengalami keterpurukan multidimensi dalam segala aspek kehidupan, meningkatnya masyarakat miskin dan anak putus sekolah, menurunnya daya beli masyarakat, melemahnya rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat, serta belum mantapnya tatanan pemerintah yang berakibat pada menurunnya kinerja pemerintah yang membutuhkan kewaspadaan semua pihak.

Senin, 18 Agustus 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur Jabar yang berisi tentang peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 58, yang bertempat dihalaman Gedung Sate Bandung oleh Gubernur Jabar, beritanya :

“Peringatan HUT RI Ke 58”

Wakil gubernur Jabar Nu'man Abdul Hakim dalam acara peringatan hari Kemerdekaan RI Ke 58, mengatakan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk

merenungkan kembali perjalanan kehidupan bangsa dan negara, serta untuk mengisi visi dan misi perjuangan bangsa dimasa depan, minggu (17/8).

Hadir dalam acara tersebut, Sesepuh Jabar seperti, Mashudi, Aboeng Koesman, Ketua MADA LVRI Jabar RH. Lili Soemantri. Kemerdekaan yang kita nikmati dan rasakan sekarang ini adalah hasil perjuangan para pejuang, yang sudah selayaknya kita renungkan sejenak, mengenang para pejuang bangsa yang telah dengan susah payah, mengorbankan harta benda, tenaga dan pikiran, bahkan nyawa untuk merebut kemerdekaan, Ungkap Wagub.

Menurut wagub, semangat kebersamaan dan solidaritas antar sesama perlu diaktualisasikan dalam menghadapi setiap perubahan dan tantangan dimasa depan. Dalam abad persaingan ekonomi antar bangsa dan derasnya arus informasi, ketahanan masyarakat perlu ditingkatkan, keterlibatan anggota masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mempersiapkan diri di era masa depan melalui peningkatan kualitas diri merupakan kekuatan dan menghadapi setiap hambatan yang menghadang setiap pencapaian tujuan pembangunan.

Selasa, 19 Agustus 2003.

Mendapat release dari Humas Tentang Rapat Koordinasi Penanggulangan Kekeringan, Kehutanan, dan Penyaluran Dana Raksa Desa, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Propinsi Jabar oleh Gubernur, beritanya :

“Kekeringan Bukanlah Faktor Alam”

Penanggulangan dampak kekeringan dan masalah kehutanan maupun mengenai penyelenggaran program raksa desa, untuk meningkatkan kinerja, pemerintah desa terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat, dibidang peningkatan pembangunan ekonomi pada khususnya. Menurut gubernur dalam sambutannya di rungan sidang DPRD Jabar, selasa (19/8).

Permasalahan kemarau yang terjadi pada tahun ini, mengakibatkan areal pertanaman mengalami kekeringan yang cukup luas, mencapai 259.000 ha diantaranya rusak berat, 52.000 ha dan puso seluas 61.000 ha, penyebabnya bukan semata-mata faktor alam, tetapi juga sebagai akibat dari ulah manusia, yang menyebabkan daya dukung lingkungan di Jabar sudah sangat tidak menunjang, bahkan cenderung semakin kritis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan meteorologi dan geofisika pusat yang disampaikan pada kesempatan rapat koordinasi dengan Menko Kesra di Jakarta 19 agustus 2003, dikemukakan bahwa sebenarnya iklim tahun ini bersifat normal, bahkan tidak ada El Nino dan cenderung La Nina. Tetapi lingkungan sudah rusak, banyak hutan yang gundul dan lahan-lahan milik masyarakat yang kritis, menyebabkan kemampuan fungsi Catchment area untuk menyerap air di musim hujan

sudah tidak menunjang, sehingga persedian air pada musim kemarau menjadi berkurang.

Rabu, 20 Agustus 2003

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur yang berisi tentang rapat koordinasi Unit Sandi dan Telekomunikasi se Jawa Barat, di Hotel Permata International, yang dibuka oleh Gubernur Jabar, yang beritanya :

“Unit Sandi dan Telekomunikasi Sukseskan Pemilu”

Perkembangan politik di negara indonesia, merupakan agenda yang patut mendapat perhatian, yaitu pelaksanaan pesta demokrasi pemilu tahun 2004. Kegiatan ini merupakan komitmen bagi seluruh elemen bangsa, yang ditutut untuk senantiasa ikut menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Menurut gubernur dalam sambutanya di Hotel Permata International Jl, Lembah Neundeut No. 7 Bandung, (2/9).

Bagi aparatur daerah di Jabar, khususnya yang bekerja pada jaringan unit sandi dan telekomunikasi, kegiatan ini merupakan bukan hal yang baru, karena setiap penyelenggaraan pemilu, selalu terlibat baik sebagai peserta pemilu, yang merupakan hak seluruh warga negara Republik Indonesia maupun sebagai penyelenggara pemilu “ujar gebernur.

Selain itu, gubernur menambahkan senagai penyelenggara pemilu, unit sandi dan telekomunikasi, yang ada diJabar khususnya, senantiasa terlibat langsung bersama lembaga penyelenggara pemilu, dimana unut sandi dan telekomunikasi diperbantukan dalam penyampaian arus informasi pemilu, terutama penyampaian hasil perolehan suara dari TPS-TPS, yang tersebar di seluruh Jabar ke penyelenggara pemilu pada tingkat pusat.

Jika dikaitkan dengan dampak pemberlakuan UU nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah yang disinyalir telah menumbuhkan keegoisan kedaerahan, maka penyelenggara rapat koordinasi teknis unit sandi dan telekomunikasi yang diikuti oleh seluruh jajaran unit sandi dan telekomunikasi Jabar.

Kamis, 21 Agustus 2003.

Meliput demo Karyawan PT. Giri Asih Jaya, langsung dilapangan dengan mewawancarai koordinatornya yaitu Acep Rusnandar dan meminta press releasenya, beritanya :

“Karyawan Tuntut Pesangon bila di PHK”

Sandang dan Kulit (PUK SPTSK) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, kamis (21/8). Sehubungan dengan permasalahan ketenagakerjaan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), antara pengusaha PT. Giri Asih Jaya dengan karyawan.

Melalui Koordinatornya Acep Rusnandar, memberitahukan bahwa para pekerja menuntut ganti rugi apabila di PHK, harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena serta memperlakukan karyawan lebih manusiawi.

Jumat, 22 Agustus 2003.

Meliput tentang demo mahasiswa di Gedung DPRD Kota Bandung yang menolak permainan Money Politics dalam pemilihan Wali Kota Bandung dengan melakukan wawancara serta meminta press releasenya, yang beritanya dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat.

“Mahasiswa Tolak Money Politics”

Tujuh badan perwakilan senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dan himpinan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Bandung mengeluarkan pernyataan sikap sebagai reaksi dari dugaan money politics dalam pemilihan walikota (Pilwalkot) Bandung. Mereka yang tergabung dalam ikatan senat mahasiswa hukum Indonesia (Ismahi) Wilayah V Jawa Barat mengimbau DPRD Kota Bandung agar melakukan sumpah tidak melakukan permainan money politics.

Imbauan dan tuntutan tersebut tertuang dalam empat butir pernyataan mereka. Koordinator Ismahi wilayah V Jabar, Yoga Rahadiansyah mengatakan pencalonan figure bakal calon dari tiap fraksi sesungguhnya merupakan proses representasi kepentingan public dan bukan hasil money politics. Oleh karena itu, Ismahi menuntut setiap fraksi agar dapat memberikan penjelasan mengenai figure-figur yang dicalonkannya sehingga terdapat suatu transparansi mengenai bakal calon yang diajukan fraksi. Mereka menuntut DPRD Kota Bandung agar melaksanakan Pilwalkot dengan mekanisme voting terbuka sehingga dapat menghilangkan praktik money politics.

Yoga menjelaskan bahwa pilwalkot ini adalah momentum awal menuju perubahan Kota Bandung saat ini. Dalam pelaksanaan otonomi Daerah, perwujudan pemerintahan yang kuat dan penciptaan good governance menjadi kewajiban utama dalam penataan kembali Kota Bandung sesuai dengan cita-cita masyarakat.

Fenomena praktik suap yang selama ini terjadi harus segera diatasisesuai dengan semangat visi reformasi yang intinya pemberantasan KKN.

Ia menilai pilwalkot ini sangat rentan dengan money politics. Permasalahan ini timbul sebagai akibat tidak adanya proses transparansi public terhadap mekanisme penjaringan dan pemilihan kepala daerah. Padahal, transparansi adalah prinsip demi terciptanya good governance. Dengan proses ini, masyarakat dapat berperan sebagai control terhadap proses pemilihan dan akuntabilitas DPRD kota Bandung dapat ditunjukkan. Sementara itu, Paguyauban Pasundan Kota Bandung menyampaikan terimakasih kepada partai yang tidak lagi egois memperjuangkan partai, tetapi memperjuangkan warga Bandung. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas silih eledan dan silih simbeuh ku kadeudeuh turta ku kanyaah papada ki sunda hingga tak terjadi hal-hal yang riweuh dan ngaririwueh. Ujar Kabid Organisasi T. Subarsas Sumadikara kepada PR.

Menurut dia, apapun alasannya, tidak ada harus kalah menang dalam pilwalkot Bandung, pasalnya yang menang pada akhirnya haruslah hati nurani orang Bandung sendiri sebagai teladan kehidupan kedepan. Semua yang mengkristal menjadi iklim kondusif seperti ini di kota Bandung antara lain karena besar peran anggota dewan. Jika ada beda ekspresi dan apresiasi, sebenarnya layak kita pahami sebagai filter, rambu-rambu atau isyarat kesejadian yang sebenarnya sama-sama mikayaah kota Bandung. Yang terjadi kemudian, ekspresi-ekspresi yang timbul dan yang ditimbulkan tidak mencuat jadi kebencian yang menggumpal dalam bentuk konflik horizontal. Tuturnya.

Agar kemulusan dan kearifan prosesi pilwalkot yang telah berjalan selama ini tidak tercela, Subarsyah mengimbau agar semua pihak mengarahkan kembali bersama-sama menuju satu titik khitah yakni mengabdi untuk jucung agungna kota Bandung yang makin luhung. Hal ini hanya mungkin terjadi dan dapat diwujudkan manakala anggota dewan dan semua pihak mampu merepresentasikan harapan mayoritas masyarakat kota Bandung.

DPC Partai Pelopor kota Bandung mengharapkan ketiga pasangan kandidat dapat bersaing secara sehat dan fair, tanpa harus menimbulkan gejolak yang kontraproduktif ditengah masyarakat. Satu hal yang mendesak yang perlu dilakukan walikota terpilih adalah konsolidasi dan rasionalisasi birokrasi di tubuh Pemkot Bandung, kata ketuanya. Fidel Gawa yang didampingi Suhenda M.M. jumat (22/8).

Dikatakan, diantara pilar rezim orde baru, tinggal birokrasih yang belum melakukan reformasi internal, sehingga penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinyatakan sebagai musuh utama kaum reformis masih terus berlangsung dan bahkan semakin parah karena kalangan legislative juga diajak ikut serta. Untuk itu, Partai Pelopor menggariskan agenda penataan birokrasi pemkot kepada siapapun walikota terpilih, sehingga mentalitas korup dapat segera dipanggas, ujar Fidel. Dalam penilaian, walikota ataupun wakil walikota adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan pemkot yang harus memiliki jarak yang sama terhadap semua aparatur birokrasi. Terlebih saat ini adanya isu yang merebak,

bahwa dalam proses pilwalkot kali ini ada kecenderungan kubu-kubuan diantara aparat birokrasi.

Pada prinsipnya semua visi, misi dan program yang ditawarkan oleh kandidat dalam proses penjaringan walikota/ wakil walikota secara teknis berada ditangan birokrasi. Oleh sebab itu sekali lagi DPC partai Pelopor kota Bandung memandang penataan, konsolidasi dan bahkan kemungkinan rasionalisasi birokrasi merupakan langkah yang perludilakukan oleh walikota/ wakil walikota yang terpilih kelak

Sabtu, 24 Agustus 2003.

Meliput demo masyarakat di Gedung DPRD Jabar tentang Sutet, yang beritanya didapat melalui wawancara dengan koordinatornya Ujang Syarifudin, serta meminta releasenya, yang beritanya dimuat dalam Harian Umum Pikiran Rakyat..

“Warga Korban SUTET datangi DPRD”

Puluham warga dari 11 desa di Kecamatan Rancaekek, Solokan Cijeruk, Ciparay, Anjasari yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban SUTET (IKKS) mendatangi gedung DPRD Jabar, senin (25/8). Mereka menuntut PT PLN agar mengembalikan hak-hak warga yang dirugikan akibat pembangunan jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). IKKS juga meminta PLN memberi ganti rugi kepada warga yang menjadi korban SUTET.

Menurut Koordinator IKKS, Ujang Syaripudin, S.Ag., kasus SUTET di Kabupaten Bandung, pembangunan jaringan SUTET 500 kv Jawa-Bali-Nusa Tenggara berdasarkan surat kepala staf administrasi dan keuangan perusahaan listrik Negara No. M.259/SAK/1982 tertanggal 30 Juni 1982, tentang pemotongan tegakan selebar 1 meter yang ditujukan kepada kepala desa Haur Pugur Kecamatan Rancaekek, telah banyak merugikan warga.

Dampak dari projek tersebut telah menimbulkan korban lebih dari 1.000 kepala keluarga didesa-desa yang dilalui jaringan SUTET. Lebih mengkhawatirkan lagi telah jatuh korban jiwa karena terkena sengatan setrum tegangan tinggi tersebut.

Selain itu, muncul berbagai penyakit seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), kanker, kerusakan barang-barang elektronik, dan gangguan psikologis lainnya yang menimpa masyarakat disegitar SUTET, Ujamya.

Ia menambahkan bahwa jaminan pihak PT PLN yang menyatakan jaringan SUTET aman dan tidak berbahaya serta adanya jaminan apabila dikemudian hari terjadi kecelakaan maka pihak PT PLN akan bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Akan tetapi, kenyataanya jaminan pihak PT PLN itu tidak benar, bahkan pihak PT PLN selalu berkelit ketika warga meminta pertanggungjawaban. Padahal, jelas warga yang menjadi korban akibat dari jaringan SUTET yang melintasi desa-desa warga, ungkapnya.



Lebih lanjut Ujang menegaskan bahwa kebijakan politik yang dijalankan pemerintahan Orde Baru bagi rakyat kecil telah menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan implementasi dari kebijakan tersebut lebih mengutamakan aspek pertumbuhan dari pada aspek keadilan terutama bagi rakyat kecil, akibatnya, rakyat kecil selalu terpinggirkan oleh kepentingan pengusaha-pengusaha besar yang berkolaborasi dengan penguasa Orba. Jadi salah satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah korban SUTET ini, Tegasnya.

Senin, 25 Agustus 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur, tentang acara keputusan kenaikan pangkat PNSD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se Jabar Periode 1 oktober 2003, yang bertempat dihalaman Gedung Sate, beritanya :

“PNSD Naik Pangkat”

Sebagaimana diputuskan dalam keputusan kepala badan kepegawaian negara No. 13 tahun 2003, tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dalam sambutan gubernur pada acara penyerahan keputusan kenaikan pangkat PNSD pemerintah propinsi Jabar dan Kabupaten/Kota se-Jabar periode I oktober 2003, dihalaman gedung sate, senin (25/8).

Gubernur mengatakan, bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil, atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier, yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, maka kenaikan pangkat pegawai negeri sipil harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-umdangan yang berlaku. Dalam pasal 77 ayat (1) PP No. 9 tahun 2003, menyebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi dan pegawai negeri sipil yang diperlukan dilingkungannya untuk menjadi juru muda tingkat I golongan ruang I/B, sampai dengan pembina tingkat I golongan ruang IV/B.

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil yang bersangkutan terhadap negara, selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan prestasi, dedikasi dan, loyalitas, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

Senin, 26 Agustus 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur yang berisi tentang Pelepasan Calon Praja dan Alumni Praja STPDN asal Jawa Barat, oleh Gubernur yang bertempat di Aula Barat Gedung Sate, beritanya :

“Pelepasan dan Ramah Tamah Praja Asal Jabar”

Acara ramah tamah dalam rangka pembekalan bagi calon Praja dan malam pengantar tugas bagi alumni Praja STPDN tahun 2003 asal daerah Jawa Barat, yang bertempat di Aula Barat gedung sate, senin (26/8).

Bagi calon Praja yang akan menempuh seleksi tahap akhir (Pantukhir) di STPDN Jatinangor, yang berjumlah 53 orang merupakan putra/putri terbaik yang telah berhasil lulus saringan yang sangat ketat. Agar setiap peserta seleksi yang lulus pada setiap seleksi harus layak sesuai dengan syarat, yang berdasarkan potensi dan kemampuan dirinya, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Selanjutnya, kapada para alumni Praja STPDN tahun 2003 asal pendaftaran propinsi Jabar yang baru saja lulus, akan langsung diterjunkan untuk tugas dilingkungan pemerintahan propinsi Jabar maupun pemerintahan Kabupaten/Kota se-Jabar.

Rabu, 27 Agustus 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur yang berisi tentang kegiatan Gubernur, ketika Pembukaan Pameran Museum dan Filateli Musphilex 2003, di Museum Geologi Jl. Diponegoro 57 Bandung, yang beritanya :

“Filateli Membuka Peluang Pekerjaan”

Pembukaan pameran museum dan filateli MUSPHILEX 2003 yang bertempat di Museum Geologi Jln. Diponegoro 57 Bandung, rabu (27/8). Dalam sambutannya gubernur mengatakan bahwa perkembangan alam dan budaya bangsa masyarakat Jabar semakin arif dalam menyikapi setiap kejadian alam dengan segala dampaknya maupun perubahan budaya yang berkembang dewasa ini, yang sangat penting bagi generasi muda dan pelajar dalam menghadapi masa depan sebagai generasi penerus.

Filateli merupakan kegiatan hobi yang memiliki banyak nilai positif yang dapat membantu pembentukan watak yang unggul bagi masyarakat khususnya generasi muda. Sifat-sifat disiplin yang tinggi, pantang menyerah, rajin, jujur, ulet, bercakrawala pengetahuan yang maju, daya pikir yang tajam dan persahabatan, yang

luas terpupuk dalam kegiatan filateli merupakan modal utama bagi kemajuan Jabar sebagai sumbangsih yang berharga bagi perkembangan Indonesia. Ujar gubernur.

Gubernur menambahkan, kegiatan filateli memberikan kesempatan dan peluang terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Jabar, kegiatan ini juga melahirkan penulis dan wartawan filatelistis, juru lelang filatelistis, bursa filateli, pedagang benda filateli, penerbit katalog prangko yang semua itu merupakan lapangan pekerjaan yang baik, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kamis, 28 Agustus 2003.

Meliput tentang demo karyawan PT DI Gedung DPRD Jabar dengan melakukan wawancara langsung bersama koordinatornya serta meminta press releasenya, beritanya dimuat dalam Harian Umum Pikiran Rakyat.

“Ribuan Karyawan PT DI Dialog Dengan Gubernur”.

Keinginan karyawan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk bertemu Gubernur Jabar Danny Setiawan, akhirnya terlaksana, kamis (28/8). Dengan bertumpukan kendaraan bak terbuka sebagai podium, Danny Setiawan didampingi Ketua DPRD Jabar Eka Santosa berdialog dengan ribuan karyawan PT DI yang saat itu berunjuk rasa di halaman luar komplek gedung sate.

Pertemuan Danny dan karyawan PT DI sebenarnya berlangsung diluar jadwal. Pada saat unjuk rasa berlangsung pun Gubernur sedang memimpin rakor penanganan kerusakan hutan dan penanggulangan kekeringan di ruang sining DPRD Jabar. Namun, peluang itu tidak disia-siakan. Sejumlah perwakilan karyawan PT DI terlihat mamantau suasana rakor di ruang sining. Upaya mereka ternyata cukup efektif. Begitu rakor berakhir, mereka berhasil “menculik” gubernur untuk berdialog dengan ribuan karyawan PT DI lain yang menunggu diluar pagar halaman depan gedung sate.

Dalam pertemuan dengan karyawan PT DI, gubernur berjanji akan memfasilitasi dialog karyawan PT DI dengan Dirut PT DI Edwin Sudarmo dan Meneg BUMN Laksamana Sukardi dan Menakertrans Jacob Nuwawa. Masalah PT DI ini adalah wewenang pemerintah pusat. Tetapi sebagai gubernur saya memiliki akses kepejabat yang berkompeten di pusat sampai kepresidenan, kata Danny.

Menurut, gubernur pemerintah pusat saat ini sedang berupaya memperkuat permodalan PT DI dengan membentuk konsorsium Negara-Negara ASEAN. Bila permodalan yang dihimpun konsorsium tersebut masih belum memadai, pemprov siap membantu membeli sebagian saham PT DI. Kalau pusat menawarkan saham PT DI ke pemprov kami siap. Tetapi sampai saat ini belum ada, katanya.

Bagaimanapun, lanjut gubernur, pemprov juga mempunyai kepentingan agar kemelut di PT DI bisa diselesaikan dengan baik. Saat ini jumlah pengangguran di Jabar sudah mencapai 1,5 juta orang. Kami tidak ingin jumlahnya semakin bertambah

gara-gara masalah PT DI, tegasnya. Peryataan serupa juga ditegaskan Ketua DPRD Jabar, Eka Santosa. Menurut Eka, provinsi sama sekali tidak punya wewenang mencampuri manajemen PT DI. Meski begitu provinsi masih punya peluang untuk masuk dari aspek ketenaga kerjaannya. Oleh karena itu, kita akan berupaya sekuat tenaga agar tidak ada PHK di PT DI, kata Eka.

Upaya gubernur dan ketua dewan untuk membantu karyawan PT DI itu ternyata cukup menenangkan keresahan karyawan PT DI. Kami akan terus memantau perkembangan realisasinya. Tetapi, kalau upaya mempertemukan kami dengan Direksi PT DI tetap gagal, kami akan tetap pergi beramai-ramai ke Jakarta, kata mereka. Sebelumnya karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SKFKK) PT DI itu mengharapkan kehadiran gubernur dapat membantu persoalan di tubuh PT DI, yang berbuntut dirumahkannya 9.000 lebih karyawan PT DI sejak dua bulan lalu. Apalagi, mereka mendengar gubernur Jabar sempat memberikan pernyataan di media massa soal kemungkinan pembelian saham PT DI oleh pemprov.

Persoalan yang kami hadapi sebenarnya bukan ketakutan di PHK. Yang kami inginkan adalah pemberlakuan manusiawi dari pihak manajemen karena ada hak-hak karyawan yang dilanggar, kata salah seorang karyawan PT DI, membuka dialog dengan gubernur. Langkah pertama penyelesaian masalah, menurut mereka, adalah pencabutan SKEP Dirut PT DI menyangkut pengrumahan karyawan, biarkan kami masuk, setelah itu baru masalah perusahaan kita bicarakan bersama-sama. Kalaupun untuk menyelamatkan perusahaan memang harus ada rasionalisasi, kami akan menerimanya asalkan dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, katanya.

Sementara itu, dalam proses sidang gugatan serikat pekerja PT DI di PTUN Bandung mengagendakan duplik dari pihak tergugat yang diwakili kuasa hukum Direktur PT DI Monang Saragih, S.H. Dalam dupliknya Monang bersikeras bahwa keberadaan Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SPFKK) PT DI sebagai lembaga yang mewakili serikat pekerja adalah tidak benar secara hukum. Karena di PT DI ada tiga serikat pekerja yakni SF FKK PT DI, Serikat Karyawan PT DI yang disingkat SK-DI, dan ada juga serikat karyawan PT DI yang disingkat Sekar. Dengan demikian tidak seluruh karyawan PT DI anggota SPFKK, Ujarnya.

Menurut Monang, penggugat asli dalam perkara tersebut sesungguhnya adalah Arif Minardi (Ketua SP FKK) dan A.M. Bone (Sekum SP FKK). Namun, yang jadi pertanyaan adalah, apakah keduanya mempunyai kekuasaan bertindak untuk dan atas nama seluruh karyawan PT DI, ujarnya. Untuk itu, Monang meminta majelis hakim menolak seluruh dalil yang dikemukakan dalam replik penggugat. Seperti biasa, dalam proses sidang kemarin para pekerja tetap memenuhi halaman PTUN Bandung dan bergerak secara bersama menuju gedung sate usai sidang tersebut. Bahkan, beberapa dari pekerja sempat menemui ketua MPR Amien Rais di hotel Homann dan meminta dukungan atas perjuangan mereka. Menurut beberapa pekerja, Amien Rais menyatakan dukungannya kepada perjuangan para pekerja PT DI dan mempersilahkan mereka bila mau menemui Amien di Jakarta.

Ketua Komisi A, Makki Juliawan dan beberapa anggota lain. Para petani dari desa Tarumajaya pada umumnya petani yang tidak memiliki lahan, tinggal dikawasan hutan Blok Haruman, Cibuluh, Sapuluh, dan Bolk Grogol. Sejak sepuluh tahun lalu, kondisi hutan dikawasan itu gundul. Selama enam tahun mengelola lahan tersebut, nyaris tidak ada larangan. Baru sekira empat tahun kebelakang, pihak perhutani mengajak para petani menggarap bermitra. Pihak perhutani mewajibkan petani menanam dan merawat tanaman pinus miliknya dengan imbalan petani dapat bercocok tanam secara tumpang sari di sela-sela tanaman pinus tersebut.

Kendati demikian, mereka dengan berat hati meninggalkan lahan-lahan garapannya begitu mendengar adanya SK gubernur yang meminta pemda dan semua instansi terkait untuk melakukan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Jabar. Namun yang membuat masyarakat khawatir karena setelah itu ada beberapa diantara mereka yang dipanggil pihak kepolisian dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU kehutanan No. 41 tahun 1999, katanya.

Oleh karena itu, melalui kuasa hukumnya, para petani penggarap meminta agar pemanggilan oleh pihak kepolisian dihentikan. Mereka juga berharap bisa mendapatkan izin menggarap lahan perkebunan Cikembang yang sejak 15 tahun lalu kondisinya terlantar. Lokasi perkebunan itu berdampingan dengan Desa Tarumajaya. Kami berharap dewan dapat memfasilitasi raoat-rapat koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menjajaki kemungkinan adanya izin menggarap lahan perkebunan terlantar itu, kata Gatot Rianto.

Selasa, 2 september 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur Jabar yang berisi tentang malam Peduli Kasih Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Jabar, yang bertempat di Hotel Horison Bandung oleh Ny. Danny Setiawan, beritanya :

“Malam Peduli Kasih Jantung Indonesia”

Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Jawa Barat, menyambut baik malam peduli kasih, mengajak hadirin untuk berderma dan membantu suksennya pengumpulan dana. Dalam bentuk riil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ujar Ny Danny Setiawan dalam sambutannya, yang bertempat di Hotel Horison Bandung, rabu (20/8).

Ny Danny menambahkan, sesuai dengan Informasi pihak yang berwenang dan kompeten di bidang kesehatan, penyakit jantung di Indonesia merupakan penyakit nomor satu yang mematikan. Penyakit ini ada yang disebabkan karena faktor keturunan, pola hidup yang kurang sehat, penyakit bawaan atau lingkungan, termasuk kurangnya pemahaman tentang seluk beluk penyakit jantung. Penyebab yang tidak kalah besarnya adalah faktor strees.

Kamis, 4 september 2003.

Meliput demo tentang Penolakan Pembangunan Waduk Jatigede dengan meminta release dan melakukan wawancara dengan koordinator FKRJ Kusnadi Chandrawiguna, beritanya dimuat dalam Harian Umum Pikiran Rakyat.

“FKRJ Minta Pembatalan Projek Waduk Jati Gede.”

Ratusan warga dari berbagai desa di kec. Jatigede Kab. Sumedang mendatangi kantor Gubernur Jabar di Gedung Sate, kamis (4/9). Warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Jatigede (FKRJ) tersebut meminta agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan waduk jatigede.

Kami menuntut rencana itu dibatalkan karena menyengsara rakyat, kata ketua BP-FKRJ Kusnadi Chandrawiguna dalam peryataannya, ketika perwakilan mereka diterima Agus Gustiar dari Biro Sarana Perekonomian Setda Jabar di Aula Barat Gedung Sate.

Warga Jatigede, yang datang dengan enam truk dan dua minibus itu, menilai pembangunan waduk Jatigede sudah kadaluarsa karena direncanakan lebih 26 tahun silam. Saat ini, dilokasi pembangunan waduk yang direncanakan, penduduknya sudah padat sehingga bila dilanjutkan akan menimbulkan problem sosial yang sulit diatasi. Pembangunan waduk menimbulkan permasalahan yang komplek. Rencana itu bahkan bertentangan dengan UU Cagar Budaya, karena akan menggusur sejarah sumedang yang cikal bakalnya berada didaerah rencana genangan, kata Kusnadi.

Walaupun rencana pembangunan waduk akan terus dilaksanakan, FKRJ menyarankan agar pembangunannya dipindahkan ke Beureum Bengeut desa Cipasang Kec. Cibugel Kab. Sumedang. Kami menilai pemindahan lokasi pembangunan waduk ini merupakan solusi yang paling baik, katanya.

Sementara itu, dilokasi pembangunan waduk yang direncanakan sebelumnya, pemerintah harus segera melaksanakan sertifikasi tanah dan bangunan sebagai perwujudan tanggung jawab masyarakat dalam hal pajak. Begitupun pembangunan sarana dan prasarana didaerah rencana genangan waduk jatigede juga perlu secepatnya dipulihkan. Selain itu, pemerintah daerah melalui SK Gubernur No. 181.1/SK-1267/Pem.Um/1981, yang direvisi melalui SK No. 36 Tahun 2000, melarang pembangunan didaerah tersebut. Ketentuan ini jelas sangat bertentangan dengan haj asasi manusia, katanya.

Agus Gustiar berjanji untuk menyampaikan aspirasi warga yang tergabung dalam FKRJ kepada Gubernur. Dia juga meminta perwakilan FKRJ hadir dalam pertemuan dengan Gubernur serta para pejabat pemerintah pusat. Pertemuan membahas rencana pembangunan waduk jatigede dijadwalkan berlangsung di gedung sate, jumat (5/9).

Rencana pembangunan Waduk Jatigede, menurut Kusnadi pula akan menggusur lahan pertanian yang subur yang seharusnya dilindungi. Hal ini sesuai

Kamis, 4 september 2003.

Meliput demo tentang Penolakan Pembangunan Waduk Jatigede dengan meminta release dan melakukan wawancara dengan koordinator FKRJ Kusnadi Chandrawiguna, beritanya dimuat dalam Harian Umum Pikiran Rakyat.

“FKRJ Minta Pembatalan Projek Waduk Jati Gede.”

Ratusan warga dari berbagai desa di kec. Jatigede Kab. Sumedang mendatangi kantor Gubernur Jabar di Gedung Sate, kamis (4/9). Warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Jatigede (FKRJ) tersebut meminta agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan waduk jatigede.

Kami menuntut rencana itu dibatalkan karena menyengsaraka rakyat, kata ketua BP-FKRJ Kusnadi Chandrawiguna dalam pernyataannya, ketika perwakilan mereka diterima Agus Gustiar dari Biro Sarana Perekonomian Setda Jabar di Aula Barat Gedung Sate.

Warga Jatigede, yang datang dengan enam truk dan dua minibus itu, menilai pembangunan waduk Jatigede sudah kadaluarsa karena direncanakan lebih 26 tahun silam. Saat ini, dilokasi pembangunan waduk yang direncanakan, penduduknya sudah padat sehingga bila dilanjutkan akan menimbulkan problem sosial yang sulit diatasi. Pembangunan waduk menimbulkan permasalahan yang komplek. Rencana itu bahkan bertentangan dengan UU Cagar Budaya, karena akan menggusur sejarah sumedang yang cikal bakalnya berada di daerah rencana genangan, kata Kusnadi.

Walaupun rencana pembangunan waduk akan terus dilaksanakan, FKRJ menyarankan agar pembangunannya dipindahkan ke Beureum Bengeut desa Cipasang Kec. Cibugel Kab. Sumedang. Kami menilai pemindahan lokasi pembangunan waduk ini merupakan solusi yang paling baik, katanya.

Sementara itu, dilokasi pembangunan waduk yang direncanakan sebelumnya, pemerintah harus segera melaksanakan sertifikasi tanah dan bangunan sebagai perwujudan tanggung jawab masyarakat dalam hal pajak. Begitupun pembangunan sarana dan prasarana di daerah rencana genangan waduk jatigede juga perlu secepatnya dipulihkan. Selain itu, pemerintah daerah melalui SK Gubernur No. 181.1/SK-1267/Pem.Um/1981, yang direvisi melalui SK No. 36 Tahun 2000, melarang pembangunan di daerah tersebut. Ketentuan ini jelas sangat bertentangan dengan hajat asasi manusia, katanya.

Agus Gustiar berjanji untuk menyampaikan aspirasi warga yang tergabung dalam FKRJ kepada Gubernur. Dia juga meminta perwakilan FKRJ hadir dalam pertemuan dengan Gubernur serta para pejabat pemerintah pusat. Pertemuan membahas rencana pembangunan waduk jatigede dijadwalkan berlangsung di gedung sate, jumat (5/9).

Rencana pembangunan Waduk Jatigede, menurut Kusnadi pula akan menggusur lahan pertanian yang subur yang seharusnya dilindungi. Hal ini sesuai



dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001, Kepres No. 34 tahun 2003, keputusan kepala badan pertanahan nasional No. 14-XII TAHUN 2003 dan UUPA No. 5 tahun 1961. Untuk mengairi lahan pertanian yang kekeringan, tidak berarti harus menenggelamkan lahan pertanian. Apalagi, harus menggusur segitar 7.116 keluarga penduduk yang selama ini tinggal diwilayah rencana genangan waduk, ujarnya.

Apabila dipaksakan, dia mengkhawatirkan pembangunan waduk akan menimbulkan berbagai ketidak puasan masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas keamanan. Apabila proses pendataan dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat sejak 1976 s.d. 1996 dinilai cacat hukum, karena prosesnya menyimpang dari aturan dan perundang-undangan.

Jumat, 5 September 2003.

Mendapat release dari Kantor Humas Gubernur yang berisi tentang acara malam Pertukaran Budaya Indonesia- Cina di Eldorado Dome Bandung, yang beritanya :

“Pertukaran Kebudayaan Indonesia-Cina”

Manusia merupakan makhluk sosial, yang sejak kecil sampai dengan kematiannya, tidak akan pernah hidup sendiri, tetapi berada dalam suatu lingkungan sosial yang berbeda satu sama lain. Sebagai bagian dari lingkungan hidup, yang terdiri antara hubungan individu dan kelompok, pola-pola organisasi yang ada dalam masyarakat, sehingga terjadi suatu interaksi diantara mereka, menurut gubernur dalam sambutannya di acara malam pertukaran budaya Indonesia-Cina di Eldorado Dome, jumat (5/9).

Gubernur mengatakan, dalam rencana strategi kebudayaan dan pariwisata tahun 2000-2005, bahwa visi pembangunan kebudayaan dan pariwisata bertujuan untuk terwujudnya kebudayaan dan pariwisata yang maju, dinamis dan berwawasan lingkungan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan peradaban, persatuan dan persahabatan antar bangsa.

Lembaga kerjasama ekonomi sosial dan budaya Indonesia Cina (LIC), perwakilan Jabar harus mampu menangkap esensi yang terkandung, dalam kebudayaan yang maju dan dinamis mengandung arti, tumbuh dan berkembang mengikuti tuntutan perkembangan jaman.

Secara konseptual kebudayaan merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungan alam sosial dan buatan, selain itu, pariwisata yang maju dan dinamis, menegaskan perkembangan pariwisata indonesia yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berperan secara signifikan dalam perkembangan bangsa dan negara.

2.2. Analisa Kegiatan

JURNALISTIK

Jurnalistik berasal dari bahasa du jour atau journal (Prancis) yang artinya “hari” atau “catatan harian”. Dalam bahasa Belanda, journalistiek artinya penyiaran catatan harian. Hal itu merujuk pada asal mula munculnya media massa pada zaman Romawi kuno dibawah Pemerintahan Julius Cesar, yang disebut Acta Diurna yang artinya papan pengumuman atau semacam majalah dinding yang di pasang dipusat Kota agar diketahui rakyat, berisai informasi dari hasil rapat senator pemerintahan Raja Julius Cesar. Ia juga disebut sebagai Bapak Perintis Pers.

Dalam kamus Bahasa Inggris, kata Journal diartikan sebagai pelaporan, pencatatan, penulisan, atau perekaman kejadian. Kamus *Tho Oxford Paperback Dictionary* mengartikan jurnal sebagai sebuah rekaman berita, kejadian, atau transaksi bisnis sehari-hari dan suratkabar atau berkala.

John M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus Inggris Indonesia mengartikan jurnal dengan majalah, suratkabar, dan diary atau buku catatan harian.

Jurnalistik adalah proses penulisan dan penyebarluasan informasi berupa berita, feature, dan opini melalui media massa.

Dari definisi tersebut didapat empat unsur yang membangun dunia Jurnalistik :

- Informasi
- Penulisan Informasi
- Penyebarluasan Informasi

- Media Massa

Selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Desk Bandung Raya Harian Umum Pikiran Rakyat, penulis telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik yang meliputi, pencarian berita, penulisan berita, wawancara, meliput demonstrasi, serta mendapatkan teknik mencari berita yang baik, yang mengandung unsure menarik, actual, factual, dan penting. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut penulis berusaha menggunakan kaidah atau teori jurnalistik yang berlaku sesuai dengan ilmu yang didapat dibangku kuliah, agar tercipta berita yang baik sesuai dengan nilai-nilai berita dalam ilmu jurnalistik.

BERITA

Berita dalam bahasa Inggris disebut news. Dalam *The Oxford Paperback Dictionary* terbitan *Oxford University Press* (1979), news diartikan sebagai informasi tentang peristiwa-peristiwa terbaru. Kamus lain, *Merriam Webster's Collegiate Dictionary* (10th Edition, 1994), mengartikan news sebagai laporan peristiwa terkini dan informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Intinya, makna harfiah berita adalah informasi atau laporan peristiwa yang baru terjadi.

News atau berita merupakan suatu laporan yang berasal dari berbagai tempat di muka bumi, berisi temuan data dan fakta, menarik sejumlah pembaca atau pemirsa melalui media cetak dan media elektronik.

News berarti berita, dikalangan wartawan news dianggap sebagai singkatan, yaitu:

N= North = Utara

E= East = Timur

W= West = Barat

S= South = Selatan

News merupakan laporan yang dihimpun melalui empat penjuru atau mata angin. Jadi, news yang disampaikan melalui media massa (cetak dan elektronik) berasal dari berbagai penjuru dunia, yang dilakukan oleh para wartawan. Kata berita sendiri berasal dari bahasa Sansakerta, Vrit (artinya ada atau terjadi) atau Vritta (artinya kejadian atau peristiwa). *Kamus Besar Indonesia*, menyebutkan berita adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.

Sumber berita adalah fakta dan data sebuah peristiwa sebuah peristiwa, meliputi apa yang kemudian menjadi rumus berita, 5W+1H : What (apa yang terjadi), Where (dimana hal itu terjadi), When (kapan peristiwa itu terjadi), Who (siapa yang terlibat dalam kejadian itu), Why (kenapa hal itu terjadi), dan How (bagaimana peristiwa itu terjadi).

Dikalangan wartawan terkenal juga definisi yang meskipun “antik” masih juga ditemui dalam literature jurnalistik. Definisi tersebut adalah ciptaan *Lord Northcliffe* dari Inggris yang berbunyi : ”If a dog bites a man it is not news, but if a man bites a dog it is news”. Terhadap definisi ini banyak yang tidak setuju, ada yang diantaranya menyatakan bahwa memang peristiwa anjing yang menggigit orang



bukanlah berita, tetapi jika orang yang digigit itu seseorang yang terkenal atau menteri, atau Jendral, atau bintang film, maka peristiwa itu bias saja menjadi berita, bahkan mungkin dianggap penting.

Menurut Prof. Mitchel V. Charm dalam bukunya, Reporting yang berbunyi sebagai berikut: "News is the timely report of facts or opinion of either interest or importance, or both, to a considerable number of people." (berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk).

Menurut Frank Luther Mott Konsep Berita meliputi:

1. Berita sebagai gambar
2. Berita sebagai interpretasi
3. Berita sebagai minat manusia
4. Berita sebagai sensasi
5. Berita sebagai rekaman
6. Berita sebagai fakta objektif
7. Berita sebagai laporan tercepat
8. Berita sebagai ramalan

Karakteristik utama sebuah peristiwa dapat diberitakan atau dapat dipublikasikan dimedia massa yaitu actual, factual, penting, dan menarik.

Nilai berita biasanya dikaitkan dengan dengan tulisan didalam pers yaitu kadar kandungan berita yang dituangkan untuk kepentingan pembaca. Nilai berita juga

WAWANCARA

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data dan fakta untuk menggali informasi, komentar, opini, fakta, atau data tentang suatu masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang dilakukan oleh wartawan, atau tenaga peneliti.

Tujuan wawancara yakni :

- Mendapatkan informasi
- Memberi informasi
- Membujuk
- Memecahkan masalah
- Konsultasi
- Mencari kerja
- Menerima keluhan
- Meninjau kinerja
- Memperbaiki atau memperingatkan
- Mengukur stress

Beberapa macam wawancara

- Wawancara berita, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan

- Wawancara pribadi, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data tentang diri pribadi dan pemikiran interviewee.
- Wawancara Eksklusif, yaitu wawancara yang dilakukan seorang wartawan atau lebih secara khusus dengan interviewee, berkaitan dengan masalah tertentu ditempat yang telah disepakati bersama.
- Wawancara sambil lalu, yaitu wawancara yang dilakukan tidak secara tidak khusus, berlangsung secara kebetulan, tidak ada kesepakatan terlebih dulu dengan interviewee.
- Wawancara keliling/jalanan, yaitu wawancara yang dilakukan oleh wartawan dengan menghubungi berbagai interviewee secara terpisah, yang satu sama lain punya kaitan dengan masalah yang akan dituliskan.

Dalam membuat suatu berita, penulis mencari berita bukan hanya melihat dari peristiwa atau demonstrasi yang terjadi, akan tetapi agar data yang diperoleh lebih akurat dilakukan dengan cara wawancara dengan orang yang mengalami peristiwa tersebut. Adapun wawancara yang sering penulis lakukan pada saat praktik kerja lapangan yaitu wawancara berita dan wawancara pribadi, sehingga berita yang dibuat akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

PRESS RELEASE

Wartawan dalam mencari berita tidak hanya terjun langsung kelapangan atau mengikuti suatu kegiatan tersebut dari awal hingga akhir, akan tetapi dapat mencari

berita kesuatu lembaga atau instansi yang memiliki Humas untuk mengetahui ada berita atau peristiwa apa yang terjadi di Instansi tersebut, yang berupa Press Release.

Menurut FrankJeffkins Press Release merupakan upaya untuk mempublikasikan suatu proses atau informasi yang maksimum untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan

Tujuan pokoknya adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman, bukan hanya menyebarkan informasi atau pesan demi citra yang indah saja dihadapan khalayak.

Selain, meliput suatu peristiwa secara langsung dikomplek Gedung Sate sebagai tempat atau pos penulis dalam mencari berita, penulis juga memperoleh release sebagai bahan berita dari Kantor Humas Gubernur yang isinya tentang kegiatan-kegiatan Gubernur hari ini, yang datanya langsung dibuat berita di kantor redaksi pada sore harinya.

Sebagai Perusahaan penerbitan suratkabar Harian Umum Pikiran rakyat, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Bahwa Harian Umum Pikiran Rakyat telah melakukan kegiatan jurnalistik, sesuai dengan kaidah-kaidah dan teori yang ada dalam ilmu jurnalistik, sehingga Harian Umum Pikiran Rakyat sangat layak dikatakan sebagai suatu perusahaan penerbitan suratkabar, baik dilihat dari tampilan medianya, komposisi, gambar, isi berita, nilai berita, rubric, halaman telah melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan sangat baik.

Pikiran Rakyat telah melakukan kegiatan jurnalistik, sesuai dengan kaidah-kaidah dan teori yang ada dalam ilmu jurnalistik, sehingga Harian Umum Pikiran Rakyat sangat layak dikatakan sebagai suatu perusahaan penerbitan suratkabar, baik dilihat dari tampilan medianya, komposisi, gambar, isi berita, nilai berita, rubric, halaman telah melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan sangat baik.

Sehingga pantas bahwa Harian Umum Pikiran Rakyat menjadi suratkabar yang besar di Jawa Barat, dan terus bertahan hingga saat ini, karena beritanya dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga mengena di hati masyarakat Jabar khususnya Bandung.

